

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG  
KALIMANTAN SELATAN  
2021**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan laporan penutup serangkaian program beserta kinerja BBPP Binuang sepanjang tahun 2021. Dalam periode tersebut di tandai kesuksesan program beserta apresiasi dan penghargaan Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah pimpinan Bapak Syahrul Yasin Limpo, di antaranya capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, peringkat pertama pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021 kategori kemitraan tingkat pusat. Sedang BPPSDMP Kementan sendiri telah sukses mengukuhkan 2.000 Duta Petani Milenial (DPM) dan Duta Petani Andalan (DPA) Pembangunan Pertanian yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Kalimantan.

Di tahun tersebut BBPP Binuang berhasil memperoleh Penghargaan D'Corp Model BBPP Binuang Sebagai 10 Peserta Terbaik Inovasi Pelayanan Publik. Selain itu juga mendapat sertifikasi ISO 37001:2016 berupaya untuk membangun konteks pendidikan dan pelatihan yang berintegritas, pendidikan dan pelatihan yang didasari oleh nilai-nilai etika dan tata kelola yang luhur. Melalui sertifikasi ISO tersebut atmosfer pelatihan di lingkup balai akan terbangun ke arah yang lebih bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

Deangan program dan apresiasi yang telah tercapai tersebut kami berharap kinerja yang akan datang dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BBPP Binuang yang lebih baik. Besar harapan kami Laporan Kinerja BBPP Binuang Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran kinerja Balai dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binuang, Desember 2021

Kepala Balai



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, MSi  
NIP. 19670731 199303 2 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kondisi Umum BBPP Binuang .....	4
C. Isu Strategis.....	14
D. Dukungan Anggaran .....	18
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis.....	20
a. Visi .....	20
b. Misi .....	20
c. Tujuan .....	20
d. Sasaran Strategis .....	21
e. Kebijakan Strategis Tahun 2020 - 2024.....	22
f. Program Kegiatan.....	23
g. Program dan Kegiatan Tahun 2020.....	23
B. Perjanjian Kinerja .....	24
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan .....	26
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
C. Kinerja Lainnya.....	34
D. Capaian Perjanjian Kinerja .....	41
E. Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....	42
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
1.	Sebaran, Jumlah dan Klasifikasi P4S .....	10
2.	Anggaran BBPP Binuang Tahun 2021 .....	18
3.	Perjanjian Kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2021 .....	24
4.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Tahun 2021 .....	27
5.	Realisasi Kinerja BBPP Binuang Dibandingkan Target Tahun 2021 .....	30
6.	Target dan realisasi Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan .....	31
7.	Realisasi Anggaran BBPP Binuang Tahun 2021 .....	32
8.	Realisasi PNBPP BBPP Binuang Tahun 2021 .....	39
9.	Realisasi Perjanjian Kinerja BBPP Binuang Tahun 2021 .....	41



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal
1.	Struktur Organisasi BBPP Binuang .....	6
2.	Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Golongan.....	7
3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	7
4.	Persentase Pagu Anggaran BBPP Binuang.....	19
5.	Persentase Indikator Jumlah Aparatur Pertanian Yang Terlatih.....	28
6.	Persentase Indikator Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Terlatih .....	29
7.	Realisasi Anggaran BBPP Binuang Tahun 2021 .....	32
8.	Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran BBPP Binuang .....	33



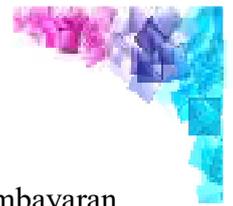
## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2021, berbagai kebijakan telah dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mensupport sektor pertanian. Dalam periode tersebut ditandai kesuksesan program beserta apresiasi dan penghargaan Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah pimpinan Bapak Syahrul Yasin Limpo, di antaranya capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan peringkat pertama pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021 kategori kemitraan tingkat pusat, yang menekankan pentingnya persaingan usaha dalam pemulihan ekonomi ke depan.

Dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan, Kementan telah melakukan strategi pembangunan pertanian melalui lima Cara Bertindak (CB). CB1 peningkatan kapasitas produksi, CB2 diversifikasi pangan lokal, kemudian ketiga penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Kemudian keempat, pengembangan pertanian modern yang didalamnya adalah memanfaatkan digitalisasi seperti pengembangan *smart farming*. Kemudian yang kelima adalah gerakan tiga kali ekspor. Menteri Pertanian Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H meminta masyarakat untuk lebih menghargai para petani dan penyuluh pertanian. Sebab berkat kerja keras keduanya, produksi pangan dalam negeri dapat terus berlangsung untuk memastikan kecukupan dari kebutuhan pangan nasional. Beliau mengatakan selama dua tahun terakhir pertanian Indonesia mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi disaat sektor ekonomi lainnya mengalami pelemahan. Masyarakat harus bersyukur karena Indonesia tetap mampu menjaga ketahanan pangan dalam negeri di saat banyak negara menguras devisa demi mengimpor bahan pangan selama pandemi.

Sementara itu dalam mendukung penyaluran kredit dari sisi pembiayaan, Kementan melakukan tiga inovasi kebijakan KUR sektor pertanian dengan Meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta. Kemudian pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok (cluster) komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan perusahaan mitra sebagai Bapak



Angkat (*offtaker*); dan Relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR. Hasilnya serapan KUR sektor pertanian per 12 November 2021 telah mencapai Rp 74,47 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 2 juta debitur. Adapun penyaluran KUR ini mencapai 106,38% melebihi dari target Rp 70 triliun.

Selanjutnya dari sisi digitalisasi, Kementan mengembangkan *Agriculture War Room (AWR)* berbasis AI, IoT, dan Robot Construction. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan), Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc menegaskan program digitalisasi tersebut dimanfaatkan untuk lemantauan kegiatan budidaya pertanian, pascapanen, pengolahan dan pemasaran. "*Lalu monitoring ketersediaan dan distribusi sarana produksi pertanian (benih, pupuk, alsintan, dll); sarana pelatihan petanidan petugas; serta sarana penyuluhan pertanian,*"

Sejalan dengan program digitalisasi tersebut BPPSDMP Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan bakal mendampingi para petani yang masih berkembang untuk dapat menerapkan sistem *closed-loop* pada kawasan pertanian yang terintegrasi. Sistem tersebut diyakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. kata Kepala BPPSDMP Kementan, Prof. Dedi Nursyamsi, "*Sistem closed-loop di kawasan yang terintegrasi perlu diimplementasikan, terutama di tempat-tempat yang petaninya memang masih berkembang,*"

Kementerian Pertanian memberikan penghargaan kepada 25 orang yang meliputi delapan penyuluh pertanian, lima petani milenial, tiga pengelola P4S, enam Widyaiswara, dua orang dosen, serta satu orang guru. Penghargaan tersebut diberikan dalam Apresiasi Sumber Daya Manusia Pertanian 2021 karena sumbangsuhnya dalam pengembangan sektor pertanian dalam setahun terakhir.

Kepala BPPSDMP Pertanian, Dedi Nursyamsi dalam event Apresiasi Sumber Daya Manusia Pertanian, mengatakan, penghargaan tersebut sekaligus untuk memberikan motivasi kepada para sumber daya manusia (SDM) sektor pertanian dalam mendukung program pemerintah dalam pembangunan pertanian nasional. "*Ini sebagai wujud terima kasih kami kepada para penyuluh, petani milenial, hingga akademisi.*"

*Closed-loop* adalah sistem agribisnis pertanian yang diintegrasikan dari level hulu hingga hilir dan seluruhnya dikelola melalui sistem digital. Hasil panen petani



juga tidak sebatas dijual dalam bahan mentah, namun diolah menjadi barang jadi sehingga memberikan nilai tambah bagi petani. Sejalan dengan harapan tersebut untuk menumbuhkan dan mencetak pengusaha petani milenial, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binnuang menyiapkan dan membekali generasi milenial, terutama DPM/DPA se-Kalimantan, serta mahasiswa dan siswa SMK yang melakukan magang atau praktik kerja di BBPP Binnuang dengan berbagai keterampilan teknis pertanian maupun kewirausahaan.

Saat ini ada 11 mahasiswa dan 22 siswa SMK yang sedang melakukan magang atau praktik kerja. Selama berada di kampus BBPP Binnuang. Mereka diberikan pelatihan berbagai keterampilan mulai dari memproduksi hasil pertanian, melakukan penanganan pasca panen, pengolahan hasil, pengemasan sampai pemasarannya. Mereka juga dikenalkan dan dilatih mengoperasikan berbagai alsintan yang ada di BBPP Binnuang, di antaranya Alsintan untuk olah tanah baik traktor roda 4, traktor roda 2 maupun cultivator.

Dalam menyikapi tuntutan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang jumlahnya sangat besar, khususnya bagi pelaku (non aparatur) pertanian, semenjak tahun 2006 sampai sekarang 2021, BBPP Binnuang telah menumbuh kembangkan 152 unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar pada 5 (lima) Provinsi se-Kalimantan, terdiri dari Kalimantan Selatan (34 lembaga), Kalimantan Barat (25 lembaga), Kalimantan Utara (15 lembaga), Kalimantan Tengah (31 lembaga) dan Kalimantan Timur (47 lembaga). Di Tahun 2021 jumlah support bantuan operasional P4S sebanyak 5 lembaga dari target 7 lembaga.

Pengelola P4S adalah para petani maju dan berhasil yang diharapkan dapat mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada petani sekitarnya, sehingga keberadaannya benar-benar dapat mendorong percepatan kebutuhan tuntutan peningkatan kapasitas SDM petani yang dilaksanakan melalui kegiatan permagangan/pelatihan. Pembinaan terhadap P4S selama ini yang telah dilakukan berupa mengikut sertakan kegiatan Pelatihan teknis agribisnis, manajemen, Instruktur, dan metodologi pelatihan bagi pengelola P4S, pemberian fasilitasi pendanaan/sharing kegiatan permagangan di P4S, serta pemberian sarana pendukung permagangan/pelatihan.



Demikian pula terhadap SDM aparatur bidang pertanian, pelaksanaan pelatihannya juga telah berusaha disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan kompetensi yang diharapkan, berbagai pelatihan teknis dan fungsional yang dilaksanakan baik biaya yang berasal APBN maupun biaya yang berasal dari pihak user (kerjasama pengguna jasa pelatihan), dilaksanakan dengan pengembangan pola dan metoda pelatihan, walaupun itu belum sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sasaran, sebagai tindak lanjutnya akan terus dikembangkan sehingga kedepan akan dimilikiya pilihan alternative model pelatihan yang dapat melengkapi dan mensinergikan program pusat dan daerah, sekaligus menjadi media sinkronisasi program pusat dan daerah.

## **B. Kondisi Umum BBPP Binuang**

### **1. Tugas dan Fungsi**

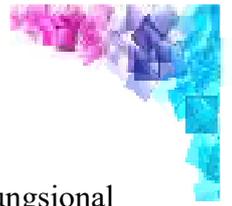
#### **a. Tugas**

Berdasarkan Permentan Nomor 106/ Permentan/ OT.140/10/2013, tanggal 9 Oktober 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, mempunyai Tugas Pokok **“melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian”**.

#### **b. Fungsi**

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan antara lain:

- a) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama.
- b) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan.
- c) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian.
- d) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur.
- e) Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri.
- f) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- g) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian.



- h) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian.
- i) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian.
- j) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.
- k) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian.
- l) Pelaksanaan bimbingan lanjutan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- m) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur.
- n) Pengelolaan Unit Inkubator Usaha Tani.
- o) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan dibidang pertanian.
- p) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan.
- q) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis.
- r) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP Binuang.
- s) Berdasarkan Permentan tersebut diatas, bahwa Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan sehari hari dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

## **2. Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

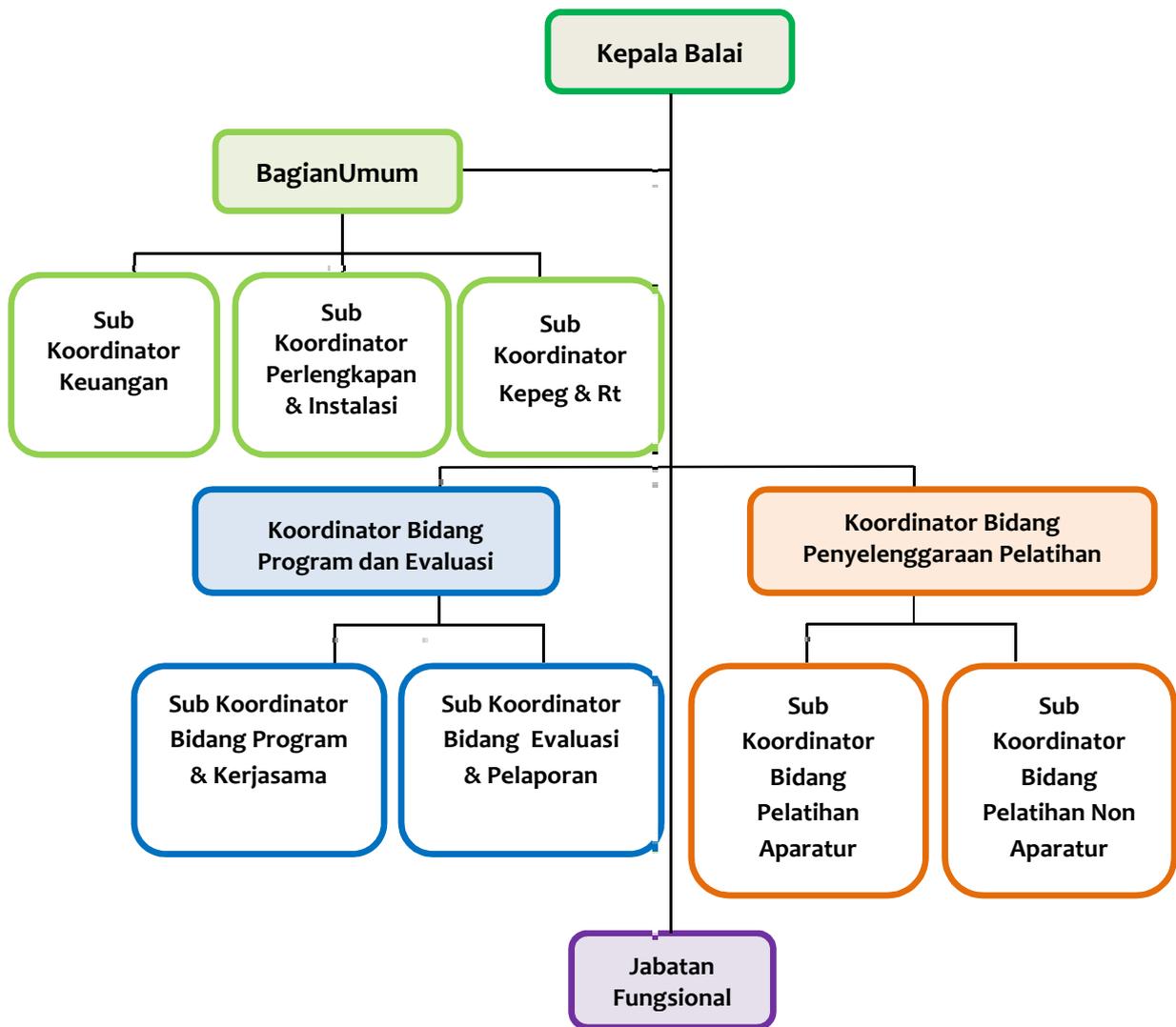
### **a. Organisasi dan Tata Kerja**

BBPP Binuang merupakan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan Unit Kerja eselon II-b. yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai.

- 1) Kepala Bagian Umum membawahi :
  - Sub Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga
  - Sub Koordinator Perlengkapan dan Instalasi
  - Sub Koordinator Keuangan



- 2) Koordinator Bidang Program membawahi :
    - Sub Koordinator Program dan Kerjasama
    - Sub Koordinator Seksi Evaluasi dan Laporan
  - 3) Koordinator Bidang Penyelenggaraan membawahi :
    - Sub Koordinator Seksi Aparatur
    - Sub Koordinator Non Aparatur
- b. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPP Binuang



**c. Sumber Daya Manusia BBPP Binuang**

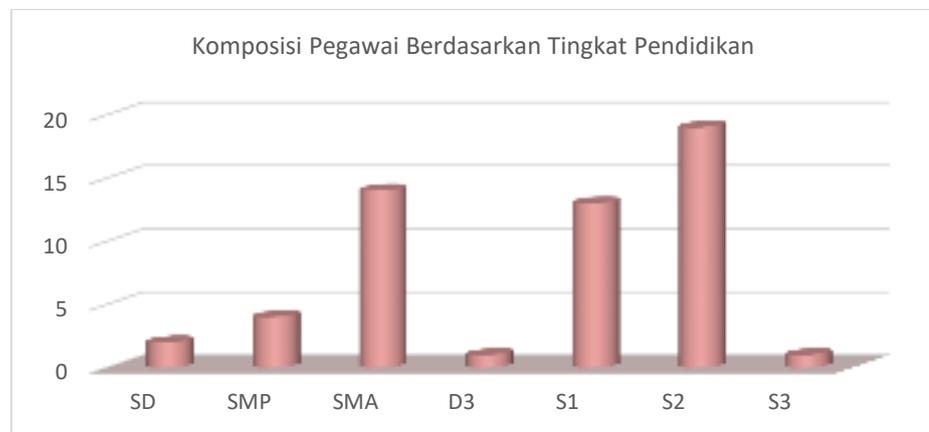
Pada Pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPP Binuang didukung oleh 50 orang aparat (data per Desember 2021), yang terdiri atas 36 Aparat laki-laki dan 14 Perempuan. Komposisi pegawai BBPP Binuang Tahun 2021 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci sebagai berikut :

- a. Golongan, terdiri atas: golongan II sebanyak 13 orang, golongan III sebanyak 28 orang. Golongan IV sebanyak 9 orang. Komposisi pegawai BBPP Binuang Per September 2021 berdasarkan golongan pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Golongan

- b. Tingkat Pendidikan, terdiri atas: S3 (doktoral) sebanyak 1 orang S2 (magister) sebanyak 19 orang, S1 (sarjana) sebanyak 12 orang, D3 (diploma) sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 11 orang, SLTP sebanyak 4 orang dan SD sebanyak 2 orang. Komposisi pegawai BBPP Binuang Tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan



## A. Aspek Strategis dan Permasalahan utama (*strategic issued*)

### 1. Aspek Strategis

#### a. Sumberdaya Alam

- a) BBPP Binnuang berada di lahan yang telah bersertifikat seluas 11,51 Hektar yang dilengkapi dengan fasilitas instalasi lahan praktek, sehingga sangat representative dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian Teknis Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Tata Guna Air, serta kewirausahaan pertanian.
- b) Instalasi lahan praktek yang tersedia seluas 6,5 hektar dilengkapi dengan sistem irigasi semi teknis yang mengalir sepanjang tahun sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan praktek budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan tanaman musiman.
- c) Secara demografi BBPP Binnuang sangat strategis, mudah diakses melalui transportasi darat dan laut yang dekat dengan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dimana Kalimantan Selatan menjadi pintu masuk untuk semua provinsi di Kalimantan, serta Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru.

#### b. Sumberdaya Kelembagaan

##### a) Organisasi dan Tata Kerja

BBPP Binnuang merupakan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan Unit Kerja Dipimpin oleh seorang Kepala Balai terdiri dari :  
Kepala Bagian Umum membawahi :

- Sub Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga
- Sub Koordinator Perlengkapan dan Instalasi
- Sub Koordinator Keuangan

Koordinator Bidang Program membawahi :

- Sub Koordinator Program dan Kerjasama
- Sub Koordinator Seksi Evaluasi dan Laporan

Koordinator Bidang Penyelenggaraan membawahi :

- Sub Koordinator Seksi Aparatur
- Sub Koordinator Non Aparatur



**b) Penguatan Kelembagaan Melalui Sertifikasi Integrasi Manajemen Mutu dan Manajemen Lingkungan (ISO 9001:2015, dan ISO 14001:2015)**

Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), adalah bentuk konsisten manajemen untuk memberikan standard minimal terhadap pelayanan penyelenggaraan pelatihan pertanian di BBPP Binnuang secara konsisten, dan sertifikasi ISO 9001:2015 (manajemen mutu) mulai diterapkan dan diperoleh sertifikasinya sejak tahun 2007. Pada akhir tahun 2016 BBPP Binnuang telah mengintegrasikan sistem pelayanan tersebut dengan Sistem Manajemen Lingkungan, (Integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO 14001:2015) secara berkelanjutan.

Hasil audit merekomendasikan BBPP Binnuang meraih sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015, maka secara optimal dengan sumber daya yang tersedia untuk :

- Berkomitmen dalam usaha pencegahan pencemaran lingkungan.
- Berperan aktif dalam usaha pelestarian dan perbaikan alam.
- Senantiasa meningkatkan mutu pelayanan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Senantiasa memenuhi sasaran mutu dan lingkungan serta persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan efektifitas sistem manajemen integrasi (ISO 9001-2015 dan ISO 14001-2015) secara berkelanjutan.
- Mengkomunikasikan system manajemen integrasi ini kepada seluruh personil BBPP Binnuang serta pihak-pihak yang berkepentingan.

**c) Lembaga Pelatihan Profesi**

Sejak tahun 2013 BBPP Binnuang mendapat mandat dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Pemerintah, yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk menyelenggarakan pelatihan Profesi khususnya bagi jabatan fungsional RIHP Penyuluh Pertanian, dan pada tahun 2021 ini dilaksanakan Pelatihan Kompetensi (profesi) yang berkaitan dengan Vokasi Produksi Benih Tanaman Padi, Vokasi Produksi Benih Tanaman Perkebunan, Vokasi Alsintan, Vokasi Mandor Kebun Kelapa Sawit dan Vokasi Fasilitator Pertanian Organik.



**d) Tempat Uji Kompetensi (TUK)**

Sebagai Lembaga Pelatihan Profesi BBPP Binnuang telah dapat penugasan untuk melaksanakan mandat Uji Kompetensi khusus bagi pejabat RIHP Penyuluhan Pertanian (Pertanian), yang dilaksanakan mulai tahun 2013.

**e) Penumbuhan dan pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)**

Tujuannya adalah pemberian pelayanan sekaligus penyediaan tempat pelatihan/magang pertanian bagi pelaku utama (non apartur) yang tidak mungkin diberikan pelayanan pelatihan/magang secara langsung di BBPP Binnuang, yang tersebar di perdesaan wilayah kerja BBPP Binnuang, dan sejak tahun 2006 BBPP Binnuang sampai saat sekarang telah membina dan mengklasifikasi sebanyak 152 (seratus empat puluh tiga) unit Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar di wilayah kerja 5 (lima) Provinsi se- Kalimantan, dengan klasifikasi masing-masingnya sbb:

Tabel 1. Sebaran, Jumlah dan Klasifikasi P4S

NO	PROVINSI	Utama	Madya	Pemula	Jumlah
1	KALSEL	0	5	29	34
2	KALBAR	4	4	17	25
3	KALTARA	0	6	9	15
4	KALTENG	1	5	25	31
5	KALTIM	0	15	32	47
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>35</b>	<b>112</b>	<b>152</b>

Di tahun 2021 terdapat penetapan penerima program bantuan penguatan kelembagaan P4S berupa sarana dan prasarana dengan target 7 lembaga dan realisasi 100%, dalam rangka penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai pusat pembelajaran petani dan untuk menunjang tugas dan fungsi P4S maka dipandang perlu untuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi P4S. Penerima program bantuan penguatan kelembagaan P4S berupa proyektor, kursi kuliah, speaker wearless, meja rapat, dan lemari buku.



**f) Inkubator Usahatani sebagai Unit Pembelajaran Usaha**

Tujuan dilaksanakan program Inkubator Usahatani (IUT) adalah merupakan pengembangan peran BBPP Binuang dalam pembinaan usaha kecil bidang pertanian/petani dalam pengembangan usahanya melalui model pembinaan inkubasi (pemeraman)/pendampingan hingga petani tersebut mampu mandiri dalam menghadapi persaingan dalam usahanya.

Unit Inkubasi Usahatani di Balai sekaligus menjadi media pembelajaran kewirausahaan bagi peserta pelatihan untuk dapat belajar pada kondisi nyata kegiatan usaha pertanian, sesuai dengan minat yang akan dikembangkannya.

**g) Sumberdaya Manusia**

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang didukung oleh 50 orang aparat (Data Per September 2021), yang terdiri atas 36 Aparat laki-laki dan 14 Perempuan, serta 29 Tenaga Harian Lepas (THL) dengan kontrak kerja per tahun.

**h) Sumberdaya Teknologi**

BBPP Binuang memiliki ketersediaan alat mesin pertanian yang cukup memadai, mulai dari peralatan pra panen, pengolahan lahan, budidaya tanaman, panen, Pasca Panen, dan sampai kepada pengolahan hasil pertanian, sehingga BBPP Binuang mampu melaksanakan pelatihan pertanian dari hulu sampai hilir. Disamping itu, sarana prasarana yang dimiliki berupa bengkel alsintan dengan petugas teknisi alsintan untuk mengembangkan berbagai alat dan mesin yang tersedia, dapat memberikan peluang pengembangan kreatifitas pertanian, baik melalui modifikasi peralatan yang telah ada, maupun merancang peralatan baru yang tepat guna dan dibutuhkan oleh petani dengan biaya murah. Pengolahan Limbah Pertanian dan pembuatan pupuk kompos dan cair dari Kotoran ternak itik.

Pendukung fasilitas lainnya, juga diperkuat dengan tersedianya Perpustakaan dan fasilitas Informasi Teknologi melalui Web Site BBPP Binuang, perpustakaan on line, yang ditunjang dengan jaringan WIFI 24 jam.



**c. Sarana Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sampai dengan tahun 2021 dimanfaatkan sebagai fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, meliputi: Quest house, Asrama Peserta, Ruang Makan, Ruang Kelas, Aula, dengan kapasitas asrama sebanyak 138 orang, Poliklinik, Agri Cafe, Inkubator Agribisnis Mart, Jalan Kompleks, Lahan praktek, Saluran Irigasi, Gedung Kantor, Gedung Perpustakaan, Musholla, Sarana Olah Raga, Lapangan Parkir, Green House, Unit Pengolahan Pupuk Organik, Alat dan Mesin Pertanian, Laboratorium Penyuluhan, Alat Pengolahan Hasil Pertanian, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Tiga, Kendaraan Roda Dua dan Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian dan lain-lain.

**1) Permasalahan Utama (*strategic issued*)**

Permasalahan yang dihadapi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan untuk peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan non aparatur pertanian adalah sebagai berikut :

**a. Aspek Kelembagaan**

- a) Sebagai UPT BBPP Binuang tidak memiliki kewenangan dalam pengembangan kelembagaan, sehingga sangat sulit untuk mengikuti pola-pola pengembangan kompetensi SDM yang menjadi tuntutan dunia kerja industri pertanian.
- b) Belum seluruh instalasi yang ada dapat mengakomodir kebutuhan kegiatan praktek peserta pelatihan, dalam mendukung optimalnya pelayanan penyelenggaraan pelatihan.
- c) Sebaran keberadaan P4S belum merata, sehingga ada beberapa Kabupaten di Provinsi se- Kalimantan (wilayah kerja) masih ada yang belum ada P4S nya, demikian pula dalam tingkat kemampuan pengelola P4S, masih banyak didominasi klasifikasi Pemula.
- d) Belum optimalnya penggunaan dan ketersediaan sarana prasana Pelatihan
- e) Belum optimalnya peran dan fungsi Inkubator Usahatani dalam mendukung penumbuhan usaha kecil pertanian dan pelatihan berbasis kewirausahaan pertanian



- f) Mandat LDP dan TUK masih fokus pada beberapa bidang keahlian atau vokasi, belum mengarah sepenuhnya ke kompetensi (SSKNI) RIHP lainnya.

**b. Aspek Ketenagaan**

- a) Terbatasnya kuantitas tenaga kepelatihan
- b) Masih kurangnya motivasi untuk pengembangan diri Tenaga fungsional khususnya Widyaiswara (Kajiwidya, Karya Tulis Ilmiah, Modul, Jurnal, Short Course dll)
- c) Belum proposionalnya penempatan tenaga pelatihan berdasarkan beban kerja dan kompetensi masing-masing petugas.

**c. Aspek penyelenggaraan**

- a) Standar mutu pelayanan Pelatihan telah menggunakan Sistem manajemen Mutu SMM ISO 9001 : 2015, dengan menggunakan instrumen SOP sebagai acuan instruksi kerja pelayanan, tetapi dalam implementasinya belum secara optimal dilaksanakan dan terkoreksi sebagai tindak lanjut perbaikannya, sehingga belum adanya revisi SOP untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan pelatihan.
- b) Belum jelasnya penjenjangan pelatihan (dasar, menengah dan lanjutan), sesuai Permentan No. 49 Tahun 2011 untuk pelatihan teknis maupun kewirausahaan
- c) Belum optimalnya peran dan fungsi P4S dalam pelayanan peningkatan SDM Petani sekitar melalui penyelenggaraan permagangan/pelatihan.

**d. Aspek Kerjasama**

- a) Belum adanya regulasi terhadap pengelolaan biaya/anggaran kerjasama sebagai dasar pengenaan tarif kerjasama baik Pelatihan maupun kegiatan pemanfaatan fasilitas kepelatihan.
- b) Belum optimalnya pemanfaatan peluang kerjasama pelatihan dan permagangan, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.

**e. Aspek Pembiayaan**

- a) Pembiayaan belum sepenuhnya mengakoodir pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi balai.
- b) Terbatasnya pembiayaan belanja mengikat (rutin) dalam menangani kegiatan pemeliharaan dan operasional sehari-hari perkantoran.



### C. Isu Strategis

Isu strategis yang saat ini berkembang dan kemungkinan besar dalam jangka waktu lima tahun ke depan akan mempengaruhi perkembangan pelaksanaan tugas BBPP Binnuang dalam aspek penyelenggaraan pelatihan dan dukungannya terhadap pengembangan agribisnis, adalah :

1. Kecukupan produksi (swasembada) komoditas strategis padi, jagung, kedelai, sapi, tebu, cabai dan bawang merah serta pengurangan ketergantungan impor.
2. Peningkatan daya saing produk di dalam negeri untuk mengantisipasi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
3. Pemantapan dan peningkatan daya saing produk.
4. Diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu.
5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
6. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di Balai Besar Pelatihan Pertanian belum dapat memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh petugas fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian untuk melaksanakan tugasnya dalam upaya meningkatkan kemampuan produksi para petani dan pelaku usaha agribisnis.
7. Pelatihan yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binnuang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kompetensi peserta untuk melakukan praktek karena terbatasnya prasarana dan sarana pelatihan.
8. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian dalam bentuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur atau Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan bagi non aparatur belum dapat dijadikan sebagai jaminan bagi aparatur maupun non aparatur yang berlatih untuk dapat bersaing dalam dunia kerja khususnya di kawasan Asia Tenggara.
9. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM Pertanian aparatur maupun non aparatur dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dengan pelatihan vokasi pertanian, meliputi vokasi calon mandor sawit, vokasi fasilitator pertanian organik, vokasi penangkar benih, vokasi sayuran organik dan vokasi yang lain yang mendukung keterampilan petani dalam mengelola usahatani.

Berdasarkan Isu strategis tersebut di atas, pelatihan yang diselenggarakan di BBPP Binnuang tahun 2021 akan lebih banyak diarahkan pada pelatihan agribisnis



komoditas strategis. Pelatihan seperti ini harus terintegrasi dengan praktek agribisnis yang dilaksanakan di BBPP Binnuang secara berkesinambungan baik yang menghasilkan produk segar maupun hasil olahan. Prasarana dan sarana pelatihan yang diperlukan untuk kegiatan agribisnis haruslah ditingkatkan jumlah dan mutunya.

Dalam perancangan pelatihan penetapan Standar Kompetensi Kerja (SKK) akan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa pelatihan baik aparatur maupun non aparatur. SKK harus disusun oleh BBPP dengan melibatkan instansi asal peserta aparatur atau instansi Pembina peserta non aparatur dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka peningkatan daya saing purnawidya pelatihan diperlukan SDM Pertanian kepelatihan yang kompeten. Widyaiswara sebagai motor penggerak dalam proses pelatihan serta tenaga kepelatihan balai haruslah terlatih dan tersertifikasi sesuai spesialisasinya. Tenaga kepelatihan yang sangat menentukan mutu penyelenggaraan pelatihan perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan sesuai standar *Management of Training* (MOT) maupun *Training Officer Course* (TOC).

Dalam penyelenggaraan organisasi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binnuang terdapat lingkungan strategis yang terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif.

1. Dalam konteks organisasi lingkungan internal positif yaitu kekuatan (*strengths*) yang dimiliki oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binnuang dalam pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian yaitu :
  - a. BBPP Binnuang terletak pada lokasi strategis di tepi jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
  - b. BBPP Binnuang memiliki sarana pelatihan berupa empat unit asrama full-AC dengan kapasitas tampung 120 orang, serta tiga ruang kelas belajar dan satu aula (full-AC).



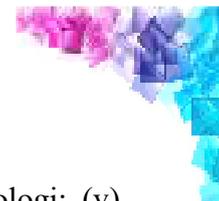
- c. BBPP Binuang menyelenggarakan 6 (enam) pelatihan yang telah terakreditasi (lima program pelatihan terakreditasi B dan satu program pelatihan terakreditasi C).
  - d. Tersedianya pedoman dan petunjuk pelaksanaan di dalam penyelenggaraan pelatihan dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian dan peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
  - e. Sistem manajemen BBPP Binuang telah tertata dengan adanya *Standard Operating Procedures* (SOP).
  - f. Widyaiswara yang ada di BBPP Binuang telah mengikuti pelatihan metodologi pelatihan dan pelatihan teknis sesuai spesialisasinya.
  - g. Sejak tahun 2012 BBPP Binuang telah memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001 : 2008. Tahun 2021 ini BBPP Binuang telah memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001 : 2015 sudah diperbaharui.
2. Adapun lingkungan internal organisasi yang negatif yaitu kelemahan (*weaknesses*) dalam pelaksanaan kegiatan saat ini meliputi :
- a. Sarana praktek untuk kegiatan pelatihan belum lengkap dan memadai.
  - b. Kompetensi pejabat struktural dan staf pelaksana belum sesuai standar.
  - c. Jumlah Widyaiswara belum memenuhi standar kebutuhan dan distribusi spesialisasinya tidak merata.
  - d. Kompetensi Widyaiswara belum tersertifikasi.
  - e. Kurikulum dan metodologi pelatihan belum mantap.
  - f. SOP belum diimplementasikan dengan baik.
  - g. Perubahan atau revisi SOP tidak dilaksanakan walaupun nomenklatur kinerja sudah berubah.
  - h. Budaya Kerja (Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin) belum sepenuhnya diterapkan oleh pejabat dan staf pelaksana.
  - i. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pelatihan belum prima.
3. Kemudian lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif yaitu peluang (*opportunities*) dalam kegiatan yaitu:
- a. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi lingkup pertanian di wilayah kerja BBPP Binuang.



- b. Kepercayaan pengguna jasa pelatihan terhadap kompetensi BBPP Binuang dalam melaksanakan pelatihan.
  - c. Tersedianya dana pemerintah kabupaten dan provinsi di wilayah kerja untuk pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan BBPP Binuang.
  - d. Terdapat Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah kerja BBPP Binuang yang memiliki kemampuan yang baik untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pelatihan non aparatur.
4. Sedangkan lingkungan strategis eksternal organisasi yang negatif yaitu tantangan (*threats*) dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :
- a. Besarnya biaya transportasi peserta khususnya yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Selatan untuk menghadiri pelatihan di BBPP Binuang.
  - b. Tuntutan kebutuhan pengguna jasa pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian yang semakin tinggi terhadap mutu pelatihan.
  - c. Sulitnya memperoleh tambahan tenaga kepelatihan khususnya Widyaiswara yang berkualitas tinggi, baik melalui detasering pegawai maupun rekrutmen tenaga baru.

BBPP Binuang sebagai lembaga Pelatihan, untuk menghasilkan SDM pertanian yang kompeten dan berkarakter, maka perlunya standarisasi lembaga, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 2/Permentan/SM.300/J/01/12 tanggal 9 Januari 2012, yang pada gilirannya mampu bersaing dengan lembaga pelatihan tenaga kerja swasta dan dikenal di tingkat internasional. Dan agar para penyelenggaranya (Widyaiswara dan tenaga kepelatihan lainnya) menjadi pengelola pelatihan yang berdaya saing dan bertaraf internasional, maka dibutuhkan Widyaiswara yang berkualitas sesuai dengan kompetensi dan spesialisasinya.

Sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara, kompetensi yang harus dimiliki oleh Widyaiswara meliputi: (i) kompetensi pengelolaan pembelajaran; (ii) kompetensi kepribadian; (iii) kompetensi sosial; dan (iv) kompetensi substantive. Sedangkan penetapan spesialisasi Widyaiswara mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Standardisasi Tenaga Kepelatihan Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/J/12/11, dengan kekhasan pertanian diwajibkan memiliki 8 jenis spesialisasi yaitu : (i) Budidaya Tanaman; (ii) Pengelolaan Limbah Tanaman;



(iii) Hama dan Penyakit Tanaman; (iv) Konservasi Lahan dan Klimatologi; (v) Mekanisasi Pertanian; (vi) Pasca Panen dan Teknologi Hasil Pertanian; (vii) Sosial Ekonomi Pertanian; dan (viii) Penyuluhan Pertanian. Sampai saat ini Widyaiswara dan tenaga kepelatihan yang ada di BBPP Binuang sepenuhnya belum didukung oleh Widyaiswara dengan spesialisasi yang diperlukan.

Isu Otonomi Daerah masih perlu menjadi pertimbangan, bahwa otonomi daerah adalah otoritas yang dimiliki daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan dan arah pembangunan didaerahnya berdasarkan potensi yang dimilikinya untuk sebesar-besarnya kepentingan kesejahteraan rakyatnya, demikian pula terhadap pembangunan sector pertanian, bahwa hampir setiap Kabupaten/kota memiliki program sendiri dalam rencana pembangunannya.

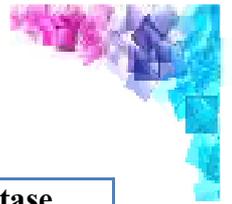
Tugas kita adalah mensinkronkan (linkage) program antara program pembangunan pertanian nasional dengan program yang diusung oleh masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota, melalui kegiatan penyelenggaraan pelatihan Fokus wilayah berbasis program pembangunan pusat dan daerah.

#### **D. Dukungan Anggaran**

Untuk mendukung misi, tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang tersedia pada revisi pagu APBN BBPP Binuang TA 2021 adalah sebesar Rp 15.999.785.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

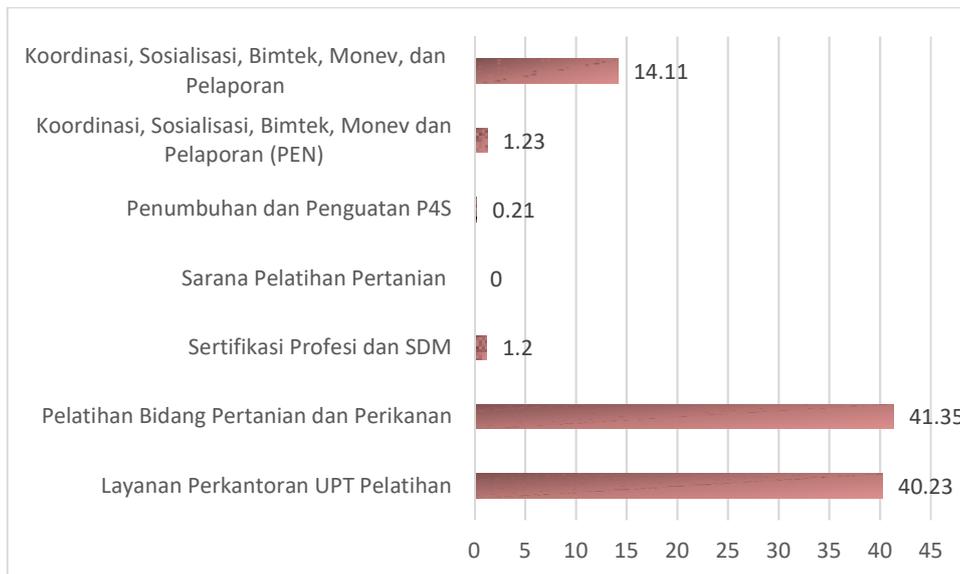
Tabel 2. Anggaran BBPP Binuang Tahun 2021

No	Uraian	Pagu (Rp)	Persentase
1	1810.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	2.258.210.000	14.11%
2	1810.AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN)	196.000.000	1.23%
3	1810.BDB.001 Penumbuhan dan Penguatan P4S	266.000.000	1.66%
4	1810.CAG.001 Sarana Pelatihan Pertanian	34.146.000	0.21%
5	1810.PDI.001	192.000.000	1.20%



No	Uraian	Pagu (Rp)	Persentase
	Sertifikasi Profesi dan SDM		
6	1810.SSC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	6.616.667.000	41.35%
7	1813.EAA.002 Layanan Perkantoran UPT Pelatihan	6.436.762.000	40.23%
	Total	15.999.785.000	100%

Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase pagu anggaran BBPP Binuang tertinggi sampai terendah adalah pada kegiatan Layanan Perkantoran UPT Pelatihan yaitu Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan 41,35%, Layanan Perkantoran UPT Pelatihan 40,23%, Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan 14,11 %, Penumbuhan dan Penguatan P4S 1,66 %, Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN) 1,23 %, Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian 1,20 % serta Sarana Pelatihan Pertanian 0,21%. Persentase pagu anggaran BBPP Binuang tahun 2021 pada Gambar 4.



Gambar 4. Persentase Pagu Anggaran BBPP Binuang

Selama Tahun 2021 berjalan total pagu sebesar Rp. 15.999.785.000,- dari revisi anggaran dari yang semula 16.896.112.000.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis BBPP Binuang tahun 2020–2024 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis tahun 2020–2024, program kegiatan dan rencana aksi pencapaian kinerja sebagai berikut :

#### 1. Visi

Dalam rangka mengembangkan tugas pokok yaitu melaksanakan dan mengembangkan teknik, pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Binuang menetapkan visi 2020 - 2024 dengan mengacu kepada visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, maka visi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (BBPP) adalah: *“Menjadi Center of Excellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing” mendukung Job Creator dan Job Seeker”*.

#### 2. Misi

Untuk dapat menjadi Center of Excellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing maka BBPP Binuang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menguatkan kapasitas kelembagaan pelatihan.
- b. Mengembangkan ketenagaan diklat.
- c. Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan diklat.
- d. Mengembangkan program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.
- e. Menyiapkan pelatihan berbasis Job Ceator dan Job Seeker.

#### 3. Tujuan

Sejalan dengan tujuan Badan PPSDMP tujuan yang dicapai oleh BBPP Binuang adalah:

- a. Menguatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian;
- b. Menguatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung penumbuhan dan pengembangan penyiapan pencari kerja sektor pertanian;



- c. Menguatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dan pekerja bidang pertanian lainnya untuk meningkatkan produksi dan daya saing pertanian
- d. Menguatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung Penguatan dan Pengembangan Penyuluhan/Pedampingan Petani dan Korperasi Petani

#### **4. Sasaran Strategis**

Dalam mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Binuang pada tahun 2020–2024 akan melakukan 4 (empat) kegiatan utama yang terdiri dari:

##### **1. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian**

- a) Terwujudnya kelembagaan BBPP Binuang yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional;
- b) Terwujudnya 20 unit Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai lembaga pelatihan yang mandiri dalam berusahatani dan mampu menyelenggarakan pelatihan/ permagangan berbasis IPTEK Internasional.
- c) Terwujudnya pendampingan pembentukan Kelompok Usaha Bersama;
- d) Terwujudnya inkubator Usahatani di BBPP Binuang.

##### **2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Peningkatan Ketenagaan kediklatan yang profesional dan berkarakter**

- a) Meningkatkan kompetensi 88 orang (kumulatif) Widyaiswara BBPP Binuang sesuai spesialisasi utamanya dalam mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian;
- b) Menambah 15 orang Widyaiswara melalui rekrutmen baru dan alih fungsi tugas sesuai standar kebutuhan dan kekhasan fungsi BBPP Binuang;
- c) Meningkatnya profesionalisme 350 orang tenaga kediklatan pada BBPP Binuang;
- e) Meningkatnya kompetensi 150 orang instruktur dan 210 orang pengelola P4S untuk menjadi wirausahawan yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional melalui penguasaan IPTEK.

##### **3. Berkembangnya Jejaring Kerjasama Diklat Dalam dan Luar Negeri**

- a) Meningkatnya promosi, publikasi, dan sosialisasi kelembagaan pelatihan melalui berbagai media informasi seperti pameran, profil, media cetak, elektronik, diorama, display, dan lain-lain;



- b) Meningkatnya jejaring kerjasama diklat dan/atau permagangan dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaannya;
- c) Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama diklat dan permagangan pertanian dalam dan luar Negeri dengan pihak terkait.

## 5. Kebijakan Strategis Tahun 2020–2024

### A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan umum Badan PPSDMP dalam pengembangan sumberdaya manusia pertanian, adalah:

1. Penguatan pendidikan vokasi pertanian untuk menghasilkan Job Creator dan Job Seeker.
2. Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi pertanian untuk menghasilkan *Job Creator* dan *Job Seeker*
3. Penguatan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
4. Penguatan system manajemen peningkatan kompetensi ASN dan Pekerja bidang pertanian untuk meningkatkan produksi dan daya saing pertanian.

Sejalan dengan arah kebijakan Badan PPSDM Pertanian terkait dengan kegiatan Pelatihan Pertanian pada Balai Besar Pelatihan Pertanian difokuskan pada ***Peningkatan Daya Saing dan Kinerja Pelatihan untuk Mendukung menghasilkan Job Creator dan Job Seeker***, yaitu:

1. Membangun eksistensi dan kemandirian lembaga melalui program berorientasi pasar, pengembangan agribisnis dan optimalisasi sarana prasarana bagi berbagai kegiatan produktif dan bernilai tinggi;
2. Pengembangan Kelembagaan dan Sarana-Prasarana UPT Pelatihan Menuju Badan Layanan Usaha (BLU);
3. Peningkatan kompetensi Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang profesional dan berkarakter;
4. Diklat Berbasis Standar Kompetensi Kerja yang berdaya saing;
5. Pengembangan model dan pola diklat yang berorientasi pasar, bio-industri berkelanjutan, berbasis kawasan, diklat di tempat kerja, berbasis kreatifitas, dan lain-lain;
6. Fasilitasi P4S sebagai lembaga diklat swadaya;



7. Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.

## **B. Strategi**

Strategi kebijakan pelatihan pertanian adalah meningkatkan Daya Saing dan Kinerja Balai Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Standarisasi mutu layanan kediklatan;
2. Peningkatan prasarana dan sarana UPT pelatihan pertanian.
3. Pemberdayaan P4S sebagai penyelenggara diklat non-aparatur dan TUK.
4. Peningkatan kapasitas Widyaiswara dan Tenaga Kediklatan;
5. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing;
6. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan.

## **6. Program Kegiatan**

Program Badan PPSDMP Pertanian adalah Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian, yang dijabarkan pada Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian yaitu Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian. Dalam mengimplementasikan Program tersebut Puslatan merumuskan kegiatan dan indikator kedalam 4 (empat) pilar yaitu : (i) Peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; (ii) Kelembagaan pelatihan pertanian; (iii) Peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian; (iv) Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan. Balai Besar Pelatihan Pertanian sebagai UPT Pelatihan Pusat mempunyai program yang sama dengan Puslatan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi eselon I .

IKU Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sebagaimana yang tertuang pada IKU Pusat Pelatihan Pertanian yaitu:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binuang.
- b. Penurunan rata rata *Competency Gap Index* peserta pelatihan pertanian.
- c. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Binuang yang terjadi berulang.
- d. Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015).

## **7. Program dan Kegiatan Tahun 2021**

Program Tahun 2021 adalah peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian dengan kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah :



- a. Pemantapan sistem pelatihan pertanian, terdiri dari program :
  - Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian
  - Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
  - Penumbuhan dan Penguatan P4S.
- b. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian.
- c. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
- d. Pemantapan pendidikan pertanian.

## B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja dituangkan kedalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, Penetapan Kinerja disusun setelah DIPA ditertibkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

### Unit Eselon I : BPPSDMP

Tahun : 2021

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2021

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target	
1	2	3	
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	75	%
Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,91	Skala Likert



Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target	
1	2	3	
Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	33.5	Nilai
Terkelolanya anggaran BBPP Binuang yang akuntabel dan berkualitas	Persentase rekomendasi reuiu laporan keuangan BBPP Binuang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektoral Jenderal  Presentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang terhadap total temuan BPK atas Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	91	%



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Balai Besar Pelatihan Pertanian Binnuang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021. Sebagai bahan evaluasi kinerja juga dibandingkan dengan kinerja lima tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun yaitu tahun 2021 - 2024.

#### A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja BBPP Binnuang dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2021 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80-100), (3) cukup berhasil (capaian 60-80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead Indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II menggunakan jenis indikator *output*. Sehingga Perjanjian Kinerja (PK) eselon II menggunakan *Lag Indicator*.

#### B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.



Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Capaian kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binnuang tahun 2021 diuraikan masing-masing tiap sasaran strategis dan indikator kinerja, meliputi : capaian kinerja tahun 2021, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Berikut disampaikan uraian capaian kinerja.

### 1. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021

**Unit Eselon I : Badan PPSDMP**  
**Tahun Anggaran : 2021**

#### **(A) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional**

##### **Indikator : Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya**

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) (Permendagri No. 86/2017). Sedangkan indikator kinerja sasaran kegiatan adalah indikator keluaran (*output*) yang mencerminkan kinerja capaian dari pelaksanaan kegiatan pada BBPP Binnuang.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Tahun 2021

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Menerapkan IKSK	Persentase (%)
1	Pelatihan Aparatur	603	596	98.84
2	Pelatihan Non Aparatur	950	869	91.47
3	Pelatihan Tematik	185	185	100.00
4	Manajerial BPP Kostratani	120	120	100.00
5	Vokasi	92	81	88.04
6	Bimbingan Teknis	1166	729	62.52
<b>Total</b>		<b>3116</b>	<b>2580</b>	<b>82.80</b>

#### **Rumus capaian IKSK**

Nilai  $\{(\sum \text{SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan}) : (\sum \text{Total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian}) \times 100\% \} = 2580 / 3.116 \times 100\%$ .



Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binnuang, Kalimantan Selatan Tahun 2021 berdasarkan sistem aplikasi elektronik Penilaian Indikator Kinerja (e-PIK) sebesar 82,80 % dari target 75%.

**a. Jumlah pelatihan vokasi pertanian bagi aparat**

Target kinerja BBPP Binnuang tahun 2021 untuk indikator kinerja jumlah aparat pertanian yang terlatih adalah 60 orang dengan rincian target. Untuk tahun 2021 realisasi capaian indikator kinerja jumlah aparat tahun sebesar 60 orang (100%). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Binnuang tahun 2021 untuk indikator jumlah aparat pertanian yang terlatih :



Gambar 5. Persentase Indikator Jumlah Aparatur Pertanian Yang Terlatih

Gambar diatas menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target kinerja BBPP Binnuang 2021. Persentase jumlah aparat pelatihan yang telah dilatih sebesar 100% sesuai target yang telah direncanakan.

**b. Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur**

Target kinerja BBPP Binnuang tahun 2021 untuk indikator kinerja jumlah non aparat pertanian yang terlatih adalah 547 orang dengan. Terdiri dari Pelatihan bagi Non Aparatur, dan Pelatihan Tematik Berbasis Korporasi mendukung Food Estate. Untuk tahun 2021 realisasi capaian indikator kinerja jumlah non aparat tahun tahun 2021 sebesar 547 orang dari atau sebesar (100%). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Binnuang tahun 2021 untuk indikator jumlah non aparat pertanian yang terlatih :



Gambar 6. Persentase Indikator Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Terlatih

Gambar 6 menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target kinerja BBPP Binnuang tahun 2021. Persentase jumlah non aparatur pelatihan yang telah dilatih sebesar 100 % sesuai target yang telah direncanakan.

**c. Jumlah Aparatur Dan Non Aparatur Pertanian Yang Disertifikasi**

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah Aparatur dan non aparatur pertanian yang tersertifikasi tahun 2021 sebanyak 114 dari target 106. Sertifikasi tersebut berupa sertifikasi fungsional, sertifikasi produksi benih tanaman padi dan sertifikasi THP - TBPP (Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) yang belum lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

**d. Bimbingan Teknis (Bimtek)**

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binnuang mendampingi pelaksanaan Bimtek terutama mendukung program Food Estate, dan pelatihan lainnya. Bimtek tersebut meliputi Pertanian Terpadu, Integrasi Tanaman, dan Kelompok Usaha Bersama, dll. Realisasi yang telah dicapai mencapai 1.500 orang atau 100% dari capaian target.

**e. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian**

Realisasi capaian indikator peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian tahun sampai dengan tahun 2021 telah menumbuh kembangkan P4S sebanyak 152, terdiri dari tingkatan P4S utama, madya dan pemula masing masing 5, 35, dan 112 lembaga, yang tersebar pada 5 (lima) Provinsi se-Kalimantan (Kalimantan selatan, Kalimantan barat, Kalimantan utara, Kalimantan tengah dan Kalimantan timur).



#### f. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor pertanian tahun sudah mencapai 100%. Terdiri dari Pelatihan bagi Aparatur (PEN), Pelatihan Manajerial BPP Kostratani (PEN), Pelatihan Teknis bagi Non Aparatur (PEN). Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dikucurkan karena merupakan kontributor utama pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), karena selalu tumbuh positif dan menjadi bantalan ekonomi selama pandemi Covid 19.

Secara keseluruhan realisasi kinerja BBPP Binuang dibandingkan dengan target sebagai berikut :

Tabel 5. Realisasi Kinerja BBPP Binuang Dibandingkan Target Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target Tahunan		Realisasi Triwulan IV 2021	Persen
	2021	Satuan		
Pelatihan Vokasi bagi Aparatur	60	orang	60	100%
Pelatihan bagi Non Aparatur	547	orang	547	100%
Pelatihan Tematik Berbasis Korporasi mendukung Food Estate	210	orang	215	102,38%
BIMTEK bagi Petani dan Penyuluh	1.500	orang	1.500	100%
Pelatihan bagi Aparatur (PEN)	780	orang	780	100%
Pelatihan Manajerial BPP Kostratani (PEN)	120	orang	120	100%
Pelatihan Teknis bagi Non Aparatur (PEN)	1.890	orang	1.890	100%
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	106	orang	114	107,55%
Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Penumbuhan dan Penguatan P4 S)	7	lembaga	7	100%

#### g. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPP Binuang Tahun 2021 Dengan Target Tahun 2021

Program Tahun 2021 adalah peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian dengan kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah Pemantapan sistem pelatihan pertanian yang terdiri Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian, Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian, serta Penumbuhan dan Penguatan P4S.



Tabel 6. Target dan realisasi Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian

<b>Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Capaian</b>
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	106	115	100%
Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur	60	60	100%
Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur	547	547	100%

**(B) Reformasi Reformasi Birokrasi BBPP Binuang Yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi Layanan Pada Prima**

**Indikator : Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (MPMRB)**

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penlian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Binuang dilakukan secara tahunan, sehingga untuk tahun 2021 realisasi capain yang dihitung sebesar 33,5 atau sebesar 100%.

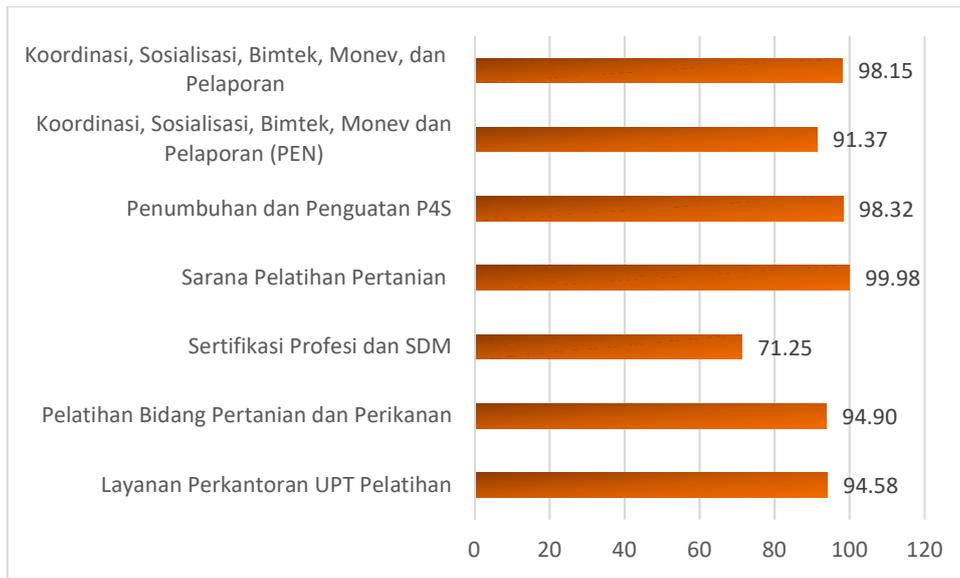
### (C) Terkelolanya Anggaran BBPP Binuang Yang Akuntabel Dan Berkualitas

#### a. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2021, pagu anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah Rp. 15.999.785.000,-. Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan tanggal tahun 2021 adalah sebesar sebesar Rp. 15.195.129.674,- atau telah mencapai 94,97%.

Tabel 7. Realisasi Anggaran BBPP Binuang Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	1810.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	2.258.210.000	2.216.473.275	98,15%
2	1810.AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN)	196.000.000	179.085.447	91,37%
3	1810.BDB.001 Penumbuhan dan Penguatan P4S	266.000.000	261.519.584	98,32%
4	1810.CAG.001 Sarana Pelatihan Pertanian	34.146.000	34.140.000	99,98%
5	1810.PDI.001 Sertifikasi Profesi dan SDM	192.000.000	136.808.175	71,25%
6	1810.SSC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	6.616.667.000	6.279.357.471	94,90%
7	1813.EAA.002 Layanan Perkantoran UPT Pelatihan	6.436.762.000	6.087.745.722	94,58%
	Jumlah	15.999.785.000	15.195.129.674	94,97%



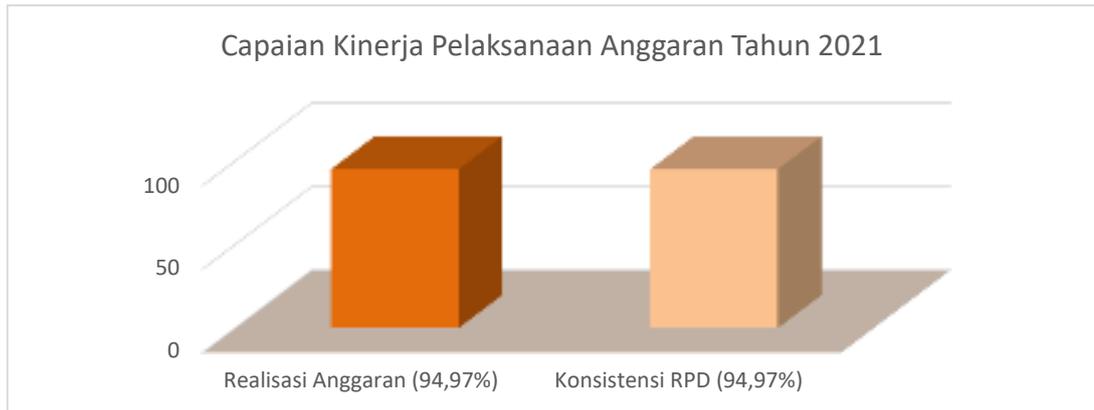
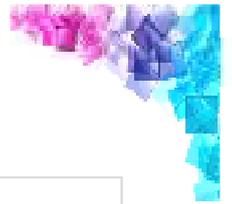
Gambar 7. Realisasi Anggaran BBPP Binuang Tahun 2021 (dalam persentase)

**b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

**a. Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiennya adalah penggunaannya sumber daya anggaran. Selain jumlah sumberdaya manusia yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi kerja.

Capaian realisasi anggaran BBPP Binuang pada tahun 2021 sebesar Rp. 15.999.785.000,- dan Realisasi anggaran sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 15.195.129.674,- (94,97%), jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 249/2011), capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPP Binuang tahun 2021 pada gambar berikut :



Gambar 8. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran BBPP Binuang

Berdasarkan Gambar 8 pencapaian nilai kinerja BBPP Binuang tahun 2021 termasuk kedalam kategori BAIK. Persentase capaian kinerja BBPP Binuang tahun 2021 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 249/2011 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase pencapaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 94,32%.
2. Persentase pencapaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD adalah Rp 15.999.785.000 dengan realisasi sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 15.195.129.674,- sebesar 94,97%.

### C. Kinerja Lainnya

Berdasarkan 4 (empat) kegiatan indikator kinerja, yakni (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binuang, (2) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Binuang yang terjadi berulang, (3) Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang 5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015, Maka pencapaian masing-masing kegiatan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binuang = 3,91 (skala likert) dari target 3,91, persentase 100 % (kategori berhasil).
- 2) Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang 5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015 = sudah ada pemeriksaan Itjen dan telah selesai memenuhi rekomendasi Itjen tersebut.
- 3) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Binuang yang terjadi berulang = tidak ada temuan dari hasil pemeriksaan BPK.



4) Penghargaan D'Corp Model BBPP Binuang Sebagai 10 Peserta Terbaik Inovasi Pelayanan Publik

D-Corp Model (Divisi Bisnis Serbasis Korporasi) terpilih Daftar 10 peserta terbaik inovasi terpilih untuk kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD, Kementerian Pertanian akan berpartisipasi dengan mengusulkan 10 (sepuluh) inovasi pelayanan publik terpilih pada Kelompok Umum serta sesuai surat Menteri PANRB Nomor B/66/M.PP.00.05/2021 tanggal 29 Maret 2021. Serta surat Mentan nomor : 67/OT.080/M/5/2021 tanggal 4 Mei 2021, tertanda tangan Menteri Pertanian (Mentan) Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.

5) Sertifikasi ISO 37001:2016

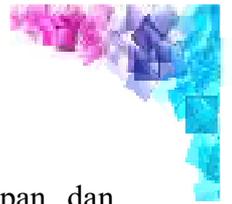
ISO 37001 merupakan sebuah standar yang dirilis sejak 2016, yang mengatur tentang sistem manajemen anti penyuapan atau yang dikenal dengan istilah SMAP. Sebagai sebuah standar yang berlaku secara internasional, ISO 37001:2016 berupaya untuk membangun konteks pendidikan dan pelatihan yang berintegritas, pendidikan dan pelatihan yang didasari oleh nilai-nilai etika dan tata kelola yang luhur.

Dengan memiliki sertifikasi di bidang ini, BBPP Binuang secara eksplisit ingin mengungkapkan komitmennya terhadap anti penyuapan, sehingga dengan cara yang sama balai akan memberikan resonansi dengan berbagai pihak yang berhubungan dengannya (stakeholders) untuk menjalankan komitmen serupa. Melalui cara inilah atmosfer pelatihan akan terbangun ke arah yang lebih bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

Hasil pengukuran kinerja BBPP Binuang tahun 2021 dari realisasi capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

**a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binuang**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur



penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamantkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPan) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 dan pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur yang mengacu

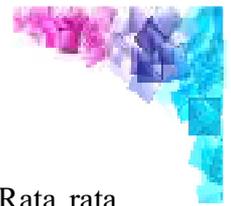


pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2019 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu :

1. Persyaratan pelayanan, yaitu ketentuan untuk mendapatkan suatu jenis pelayanan publik yang meliputi persyaratan administrasi dan teknis.
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi pelayanan publik dan penerima pelayanan publik termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan, yaitu Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik.
4. Biaya/tarif pelayanan, yaitu biaya atau tarif yang dikenakan.
5. Kesesuaian Produk Pelayanan, yaitu kesesuaian Produk yang dikeluarkan dengan aturan yang telah ditetapkan.
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian petugas dalam melayani ataupun menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Perilaku Petugas dalam Pelayanan Terkait Kesopanan, yaitu sikap dan perilaku petugas secara ramah dan sopan serta menghormati dan menghargai masyarakat.
8. Kualitas Sarana dan Prasarana, Yaitu kondisi sarana dan prasarana yang baik dan layak digunakan.
9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil survei SKM dan Nilai Rata - Rata (NRR) pada tahun 2021 yang diperoleh dari 9 Indikator Unsur pelayanan, diperoleh nilai rata-rata :

1. Persyaratan Pelayanan	:	3.91
2. Prosedur Pelayanan	:	3.91
3. Waktu Penyesuaian Pelayanan	:	3.88
4. Biaya/ Tarif Pelayanan	:	3.98
5. Kesesuaian Produk Pelayanan	:	3.88
6. Kemampuan Petugas Pelayanan	:	3.89
7. Kecepatan pelayanan	:	3.89
8. Kualitas Sarana dan Prasarana	:	3.98
9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	:	3.89



Melihat hasil tabulasi dari 9 Unsur Pelayanan tersebut diperoleh Nilai Rata rata Tertimbang per unsur adalah : 3,91 (kategori mutu pelayanan sangat baik) Dan Nilai SKM Unit Pelayanan : 97.76 (A = Sangat Baik).

Dari hasil tabulasi tersebut dapat dilihat bahwa dengan nilai SKM 97.76 atau 3,91 disimpulkan bahwa kategorisasi mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan adalah *Sangat Baik*. Jika dilihat dari Nilai Rata Rata (NRR) unsur *Kualitas Sarana dan Biaya/ Tarif Pelayanan* (3,98) nilai tertinggi, sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah unsur *Waktu Penyesuaian Pelayanan dan Kesesuaian Produk Pelayanan* (3,88). Angka ini menunjukkan bahwa Kualitas Sarana dan Biaya/ Tarif Pelayanan paling tinggi, sedangkan Waktu Penyesuaian Pelayanan dan Kesesuaian Produk Pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Secara keseluruhan nilai SKM 3,91 termasuk kategori pelayanan sangat baik.

**b. Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BBPP Binuang, dengan Indikator Jumlah Temuan Itjen atas Implementasi SAKIP Yang Terjadi Berulang (5 Aspek SAKIP sesuai Permentan RB 12 Tahun 2015)**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan kinerja
2. Penilaian terhadap pengukuran kinerja



3. Penilaian terhadap pelaporan kinerja
4. Penilaian terhadap evaluasi internal
5. Penilaian terhadap capaian kinerja

Sampai Tahun 2021, sudah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di BBPP Binuang oleh Itjen dan sedang dalam proses tindak lanjut guna memenuhi rekomendasi Itjen tersebut.

**c. Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BBPP Binuang, dengan Indikator Jumlah Temuan BPK atas Temuan Itjen Atas Pengelolaan Keuangan BBPP Binuang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga Negara yang dikhususkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. LHP ini berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti yang cukup kuat dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Di Tahun 2021 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19, dengan hasil tidak ada temuan penyimpangan alokasi anggaran tersebut.

**d. Penerimaan PNBP**

BBPP Binuang selain menggunakan dana Rupiah Murni (RM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPP juga menggunakan dana PNPB. Kegiatan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak yang di pungut melalui bendahara penerima. PNBP Meliputi Penerimaan Umum dan Fungsional dimana pada tahun 2021, Penerimaan Umum Meliputi: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL ; penerimaan kembali



belanja lainnya TAYL ; pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara.

Pendapatan Fungsional meliputi: Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi, Perkiraan Penerimaan PNBPN untuk Penerimaan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan. Target penerimaan PNBPN sebesar Rp. 104.276.000,- dan telah diperoleh sebesar Rp. 299.927.331,- Capaian kinerja penerimaan PNBPN (287,63%) Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Realisasi PNBPN BBPP Binnuang Tahun 2021

No	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rupiah)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Penerimaan Fungsional					
1.	Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	9.214.500	8.234.000	31.584.500	12.780.000
2.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	2.000.000	3.100.000	20.750.000	2.850.000
3	Perkiraan Penerimaan PNBPN untuk Penerimaan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	-	209.414.331	-
Jumlah		11.214.500	11.334.000	261.748.831	15.630.000
Jumlah Total		299.927.331			

Realisasi penerimaan PNBPN Tahun 2021 sebesar 287,63% atau senilai Rp. 299.927.331,-



#### D. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, ditetapkan dengan rincian capaian 2021 sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi Perjanjian Kinerja BBPP Binuang Tahun 2021

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	75 %	82,80 %
Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,91	3,91
Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	33.5	33.5
Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas	Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan BBPP Binuang yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektoral Jenderal	91%	100%
	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang terhadap total temuan BPK atas Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	91%	88,08



## E. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik namun masih mengalami hambatan/kendala yaitu :

- a. Tidak tercapainya realisasi anggaran tahun 2021 dikarenakan kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi Profesi dan SDM dengan anggaran Rp 192.000.000, tetapi terealisasi Rp 136.808.175. Meskipun dari segi volume peserta tercapai yaitu dengan target 106 peserta tercapai 115 peserta, tetapi anggaran tidak bisa terealisasi dengan hanya sebesar 71,25%. Hal tersebut disebabkan anggaran transport pada kegiatan Sertifikasi Profesi dan SDM tersebut tidak digunakan, karena anggaran transport pelaksanaan sertifikasi menempel pada anggaran Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan.

Hal tersebut menjadikan permasalahan tidak tercapainya target Perjanjian Kinerja point 4 yaitu meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang. Oleh karena itu BBPP Binuang perlu melakukan tindak lanjut dengan memastikan pemisahan anggaran yang tegas antara anggaran Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan dengan Sertifikasi Profesi dan SDM.

- b. Dalam mensupport arahan Menteri Pertanian dalam hal ini BPPSDMP Kementan dalam regenerasi dan juga menumbuhkan minat milenial untuk terjun dalam bidang pertanian, melalui rumusan pentingnya petani milenial membangun jejaring antar *startup*, dengan pemerintah, dunia usaha dan industri maupun dengan bapak asuh dan angkat agar mempercepat akselerasi usaha. Jaringan Petani milenial harus menguasai pasar dan industri dari hulu sampai hilir. Pelatihan bagi milenial tidak hanya sebatas pada pelatihan kewirausahaan tapi akan dilanjutkan dengan pelatihan lainnya guna meningkatkan kapasitas manajerial korporasi.
- c. Guna menggalang dukungan Instansi terkait yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelatihan berbasis program dan wilayah, dimana pesertanya dominan berasal dari wilayah Kabupaten/Kota setempat, maka optimalisasi fungsi koordinasi dan sosialisasi menjadi sangat penting perannya sebagai upaya untuk penyamaan persepsi terhadap penyiapan SDM dalam melaksanakan program pembangunan khususnya pertanian wilayah, dan diharapkan akan mendorong dukungan yang berujung partisipasi aktif semua jajaran di pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Demikian pula terhadap kemungkinan adanya share biaya dalam



peningkatan SDM di daerah, dapat juga menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk sense daerah untuk peduli terhadap peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian, sehingga pada gilirannya pelaksanaan program pembangunan pertanian khususnya di wilayah Kabupaten/Kota akan menjadi gerakan bersama antara masyarakat, pemerintah dan swasta, dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan khususnya disektor pertanian.

- d. Kami juga terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menggali dan meningkatkan potensi pertanian di daerah masing-masing. Dengan demikian setiap daerah mampu dan dapat membuat proyeksi kebutuhan pangan dalam jangka menengah panjang demi mengantisipasi tantangan perubahan iklim yang mengancam produksi dan rantai pasok pangan ke depan.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja BBPP Binuang ini merupakan kerja bersama dan terintegrasi seluruh jajaran pejabat dan staf dengan mengedepankan proses transparansi dan juga partisipatif baik melalui sistem digital online maupun offline. Hasil pengukuran kinerja BBPP Binuang berdasarkan alokasi anggaran tahun 2021, pagu anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah Rp. 15.999.785.000,-. Capaian realisasi anggaran sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 15.195.129.674,- (94,97%) dengan nilai NKA sebesar 88,08.

Hasil pengukuran kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi adalah sebagai berikut : (1) Capaian Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebesar 82,80 % dari target 75%; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binuang = 3,91 dari target 3,91, persentase 100 % ( kategori mutu pelayanan sangat baik) dengan Nilai SKM Unit Pelayanan : 97,76 (A = Sangat Baik); (3) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Binuang dilakukan secara tahunan, dengan realisasi capaian yang dihitung sebesar 33,5 atau sebesar 100%. (4) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Binuang yang terjadi berulang = sudah dilakukan pemeriksaan dan tidak ada temuan ; (5) Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP = sudah 100% dalam proses tindak lanjut guna memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh Itjen. Realisasi penerimaan PNBPN sampai dengan bulan Tahun 2021 sebesar 272,64 %.

Demikian Laporan ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja balai sebagai unit kerja BPPSDMP. Kami berharap laporan kinerja tersebut dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode mendatang.

Lampiran 01. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BBPP Binuang Semester II 2021

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**  
**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BULAN DECEMBER 2021**

NILAI IKM	NAMA UNIT : BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG
<b>98</b>	<b>RESPONDEN</b>
	JUMLAH : 448 Orang
	JENIS KELAMIN : L : 333 Orang P : 115 Orang
	PENDIDIKAN : SD : 48 Orang
	SLTP : 49 Orang
	SLTA : 183 Orang
	DI/DII/DIII : 37 Orang
	S1 : 129 Orang
	S2 Keata: : 2 Orang
	Periode Survey: 01 Jan 2021 s/d 31 Dec 2021

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN**  
**MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI**  
**DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**NILAI IKM UNIT PELAYANAN**

**A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00**

**B (Baik) : 76.61 - 88.30**

**C (Kurang Baik) : 65 - 76.60**

**D (Tidak Baik) : 25 - 64.99**

## Pengolahan Data Kuisisioner

Perhitungan	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Nilai Per Unsur	1750	1750	1738	1782	1738	1742	1741	1784	1744
Nilai Rata Rata Per Unsur	3.91	3.91	3.88	3.98	3.88	3.89	3.89	3.98	3.89
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur (NRR per unsur x 0.1111)	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43
IKM Unit Pelayanan (Total NRT * 25)	97.76								
Mutu Pelayanan	3.91	A	Sangat Baik						

Keterangan :

- U1 : Persyaratan
- U2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- U3 : Waktu Penyelesaian
- U4 : Biaya/Tarif
- U5 : Produk Spesifikasi jenis pelayanan
- U6 : Kompetensi pelaksana
- U7 : Perilaku pelaksana
- U8 : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- U9 : Sarana dan Prasarana

## Lampiran

### Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada e-PIK Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kalimantan Selatan Tahun 2021

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Menerapkan IKSK	Persentase (%)
1	Pelatihan Aparatur	603	596	98.84
2	Pelatihan Non Aparatur	950	869	91.47
3	Pelatihan Tematik	185	185	100.00
4	Manajerial BPP Kostratani	120	120	100.00
5	Vokasi	92	81	88.04
6	Bimbingan Teknis	1166	729	62.52
<b>Total</b>		<b>3116</b>	<b>2580</b>	<b>82.80</b>

#### Rumus capaian IKSK

Nilai (( $\Sigma$  SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan) : ( $\Sigma$  Total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian) x 100%) = 2580 / 3.116 x 100%.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kalimantan Selatan Tahun 2021 berdasarkan sistem aplikasi elektronik Penilaian Indikator Kinerja (e-PIK) sebesar 82,80 %



Binuang, 15 Januari 2022

Kepala Balai

Dr. Yulia Asni Kurniawati, M.Si

NIP. 19670731 199303 2 001



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**  
**NOMOR : 09/ KPA/ I.16/ 01/ 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT DAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA**  
**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG SELAKU**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran tugas dan ketepatan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang tahun 2021, perlu menunjuk Pejabat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa Pejabat dan pelaksana sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 47 tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 no. 156, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5075);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/Permentan/ OT.140/ 10/ 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 838/ Kpts/ KU.010/ 12/ 2018 tanggal 3 Desember 2018, tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Memperhatikan

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.10.2.239640/2021 tanggal 23 November 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU**

: Menunjuk Agus Sumantri, SP./ NIP 197004052000031002, Kelompok Kerja sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pengadaan.

**KEDUA**

: Menunjuk Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Pengadaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

**KETIGA**

: Pejabat Pengadaan melaksanakan pengadaan barang/ jasa sebagai Berikut :

- a. Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**KEEMPAT**

: Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa melaksanakan pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**KELIMA**

: Tugas Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan :

- I. Pejabat Pengadaan
  - a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa;
  - b. menetapkan dokumen Pengadaan;

- i. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa;
- k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/ jasa;
- l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada KPA.

- KEENAM** : Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binuang  
Pada tanggal 04 Januari 2021

**KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN  
PERTANIAN BINUANG SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN,**



**YULIA ASNI KURNIAWATI**   
NIP. 196707311993032001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Barabai.
5. Yang bersangkutan.

- c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di *website* unit kerja masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
- e. menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menetapkan penyedia barang/ jasa untuk :
  1. penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan /jasa
  2. penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- h. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa kepada KPA;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/ jasa;
- j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada KPA.

## II. Kelompok Kerja pengadaan

- a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa;
- b. menetapkan dokumen pengadaan;
- c. menetapkan besaran minimal jaminan penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di *website* unit kerja masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
- e. menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menetapkan penyedia barang/ jasa untuk :
  1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan/ atau
  2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN  
BINUANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 09/ KPA/ I.16/ 01/ 2021  
TANGGAL : 04 JANUARI 2021  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT KELOMPOK KERJA  
PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BALAI BESAR  
PELATIHAN PERTANIAN BINUANG TAHUN  
ANGGARAN 2021.

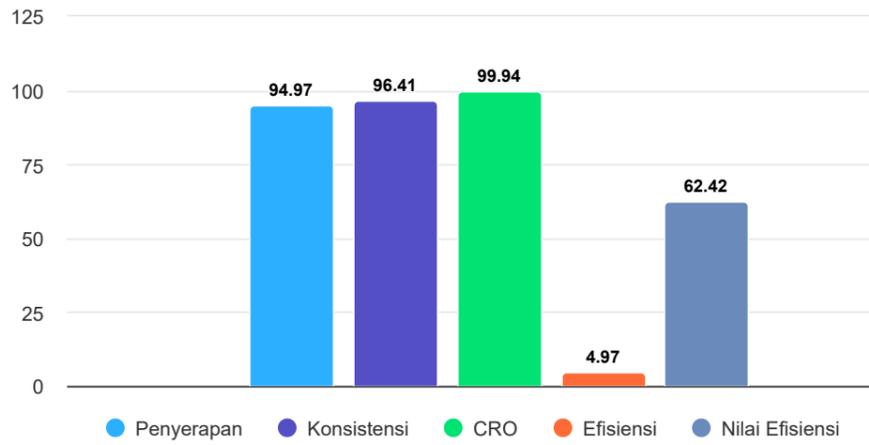
NO.	NAMA/ NIP	JENIS JABATAN
1.	Agus Sumantri, SP. NIP. 19700405 200003 1 002	Ketua Kelompok Kerja
2.	Muhammad Idrus NIP. 19640710 198603 1 002	Sekretaris
3.	Rahmadi Suryatama, A.Md NIP. 19780604 200812 1 002	Anggota

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN  
PERTANIAN BINUANG SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN,

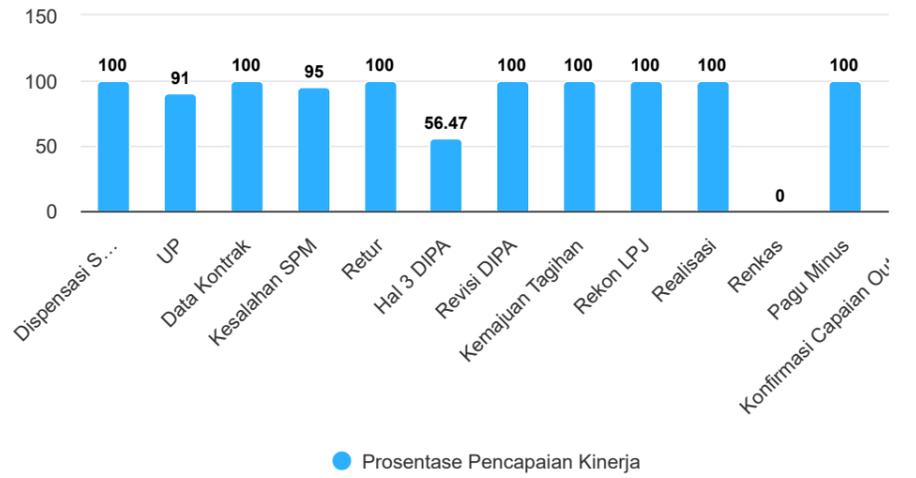


YULIA ASNI KURNIAWATI  
NIP. 196707311993032001

### Nilai SMART 88.08 Baik



### Nilai IKPA 96.68

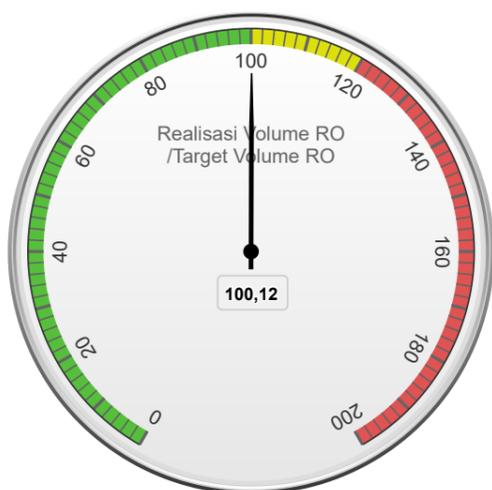


### Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2021



### Persentase Volume RO



### Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	3.723.747.000	3.653.359.769	98.11 %
52 Belanja Barang	12.241.892.000	11.507.629.905	94.00 %
53 Belanja Modal	34.146.000	34.140.000	99.98 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	nan %

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

[Sebelumnya](#)
1
[Selanjutnya](#)

## Komposisi Alokasi Anggaran

## Komposisi Realisasi Anggaran

## Partisipasi Satuan Kerja

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	Jan ↑↓	Feb ↑↓	Mar ↑↓	Apr ↑↓	Mei ↑↓	Jun ↑↓	Jul ↑↓	Ags ↑↓	Sep ↑↓	Okt ↑↓	Nov ↑↓	Des ↑↓
1	239640	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG, KALSEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) 1 [Selanjutnya](#)